

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan suatu negara adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus, merata, dan menyeluruh. Begitu juga dengan negara Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus, merata, dan menyeluruh. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adalah dengan melakukan kegiatan pembangunan nasional. Untuk itu pemerintah harus meningkatkan pendapatan negaranya agar dapat mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sumber pendapatan negara yang paling besar adalah berasal dari sektor perpajakan.

Salah satu cara pemerintah untuk mendapatkan penerimaan dari sektor perpajakan adalah dengan melakukan pemungutan pajak. Menurut Siti Resmi (2011:8), pemungutan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu (1) Pajak Negara (Pajak Pusat) : pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya; dan (2) Pajak Daerah : pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat satu (pajak provinsi) maupun daerah tingkat dua (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Mengacu pada hal tersebut serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa sebagian urusan pemerintahan telah

diserahkan kepada pemerintahan daerah, berarti pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menjalankan otonomi daerahnya.

Otonomi daerah (berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi tersebut, berarti pemerintah daerah harus mengatur, memungut dan meningkatkan sendiri pendapatan daerahnya guna membiayai pembangunan daerahnya serta secara tidak langsung membantu mewujudkan pembangunan nasional.

Salah satu sumber pendapatan yang dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah Kota Surakarta pun diwajibkan untuk meningkatkan pendapatannya, yaitu dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya serta secara tidak langsung membantu mewujudkan pembangunan nasional.

Kota Surakarta dikenal juga dengan sebutan Kota Solo dikenal sebagai kota budaya. Karena terkenal dengan kota budaya, banyak wisatawan dari dalam maupun luar negeri yang tertarik berkunjung ke Kota Surakarta. Salah satu dampak dari banyaknya wisatawan yang berkunjung adalah meningkatnya permintaan jasa perhotelan. Mengingat para pengusaha dan investor selalu berusaha mengembangkan bisnisnya dengan berbagai cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup bisnisnya, maka banyak pengusaha dan investor baik dari dalam maupun luar negeri

memanfaatkan peningkatan permintaan jasa perhotelan dengan menanamkan modalnya dalam bentuk bisnis perhotelan. Tak heran banyak dijumpai pembangunan hotel di Kota Surakarta.

Dampak lain dari banyaknya wisatawan yang berkunjung adalah meningkatnya volume kendaraan di Kota Surakarta. Hal ini terjadi pada tahun 2012 yang menyebutkan bahwa jumlah kendaraan mencapai 235.000 dan hingga awal tahun ini telah mencapai 250.000 kendaraan atau mengalami kenaikan 7,5 hingga 9 persen baik roda dua dan empat. (Dikutip dan diakses (11 November 2013 pukul 10.55) dari <http://manteb.com/berita/11054/Kemacetan.Lalu.Lintas.di.Kota.Solo>). Hal ini pun dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha dan investor untuk menanamkan modalnya dalam bentuk membuka usaha penyewaan lahan parkir.

Setiap keuntungan yang dihasilkan dari bisnis perhotelan dan penyewaan lahan parkir yang dijalankan oleh pengusaha dan investor tentunya akan dipungut pajak hotel dan pajak parkir oleh pemerintah daerah Kota Surakarta, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak hotel dan pajak parkir kemungkinan besar memiliki pengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta yang berguna untuk membantu membiayai anggaran belanja pemerintahan daerah serta secara tidak langsung membantu mewujudkan pembangunan nasional.

Pemilihan penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu oleh:

1. Aprizal M J Ompusunggu (2012) dengan judul penelitian “Pengaruh Besarnya Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung)”. Menurut hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota

Bandung dari tahun 2006 - 2010 adalah sebesar 28,9% yang berarti bahwa pemungutan pajak hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

2. Eka Wahyu Putra (2008) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Malang”. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setiap perubahan kenaikan atau penurunan penerimaan pajak hotel dan restoran Kabupaten Malang akan berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.
3. Aminudin (2007) dengan judul penelitian “Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung”. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penerimaan pajak parkir dengan pendapatan asli daerah. Selain itu kategori koefisien korelasi ini termasuk dalam kategori hubungan yang sedang dan positif yang artinya apabila penerimaan pajak parkir meningkat maka akan mengakibatkan kenaikan pada pendapatan asli daerah.
4. Bambang Ali Nurdin (2012) dengan judul penelitian “Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Terhadap Tingkat Pendapatan Dinas Perhubungan (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Tasikmalaya)”. Dari hasil penelitiannya juga menyimpulkan bahwa Pajak Parkir, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mempunyai peranan yang cukup penting untuk meningkatkan pendapatan Dinas Perhubungan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, adanya fenomena banyaknya pembangunan hotel di Kota Surakarta dan meningkatnya volume kendaraan, membuat peneliti tertarik untuk membahas mengenai pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan pajak hotel dan pajak parkir sebagai objek penelitian. Penelitian ini mengacu pada pemerintahan daerah Kota Surakarta dan penelitian ini menggunakan periode tahun yang berbeda yaitu tahun 2010 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerimaan pajak hotel dan pajak parkir berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta?
2. Apakah penerimaan pajak hotel dan pajak parkir berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta?
3. Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak parkir secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta?
4. Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak parkir secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak hotel dan pajak parkir berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak hotel dan pajak parkir berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.
3. Untuk mengetahui besar pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak parkir secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.
4. Untuk mengetahui besar pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak parkir secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Surakarta

Penulis berharap penelitian ini dapat membantu memberikan informasi yang berguna bagi pemerintahan daerah Kota Surakarta mengenai pajak hotel dan pajak parkir, sehingga pemerintah daerah Kota Surakarta dapat memaksimalkan pemungutan pajak atas pajak hotel dan pajak parkir untuk membantu mendanai pembangunan daerah Kota Surakarta.

2. Bagi Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penerimaan pajak daerah dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai perpajakan, khususnya untuk pemungutan pajak pemerintahan daerah serta diharapkan dapat membantu menjadi bahan acuan untuk penelitian yang selanjutnya.